

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia di muka bumi ini mendambakan kehidupan sejahtera, terlepas dari lokasi tempat tinggal mereka, baik di perkotaan maupun pedesaan. Kesejahteraan mencakup harmoni antara aspek fisik dan mental. Secara esensial, kesejahteraan merupakan tatanan kehidupan bermasyarakat yang meliputi aspek sosial, materi, dan spiritual, yang diiringi oleh perasaan aman, beretika, dan kedamaian batin. Dalam situasi terkini, setiap individu yang menjadi bagian dari suatu negara memiliki kesempatan dalam mengupayakan kebutuhan fisik, mental, dan sosial secara optimal bagi individu, keluarga, dan masyarakat dengan menghormati hak asasi. Menurut definisi Badan Pusat Statistik pada (2007), kesejahteraan merujuk pada suatu keadaan di mana seluruh kebutuhan material dan spiritual sebuah rumah tangga terpenuhi sesuai dengan standar hidup yang layak.

Manusia adalah makhluk yang hidup dalam keberadaan makhluk lain, dan hidup berdampingan dengan sesamanya. Sejak dilahirkan hingga akhir hayatnya, individu tidak dapat terlepas dari relasi dengan manusia lain. Dengan demikian, hakikat manusia adalah sebagai makhluk yang bersifat individual sekaligus sosial dalam konteks masyarakat (Kaelany, 2000:157). Dalam perspektif Al-Qur'an, relasi antar manusia ditandai dengan keragaman ciptaan Allah dalam berbagai aspek kehidupan. Perbedaan jenis kelamin, suku bangsa, bahasa, warna kulit, serta berbagai keunikan lainnya diciptakan agar manusia saling mengenal dan berinteraksi secara positif, bukan untuk merendahkan perbedaan yang ada.

Namun, bagaimana individu dengan segala keunikan yang melekat pada diri mereka dapat membangun persatuan demi mewujudkan kehidupan yang selaras dan penuh ketenteraman. Mengingat manusia sebagai makhluk sosial yang saling bergantung, eksistensi dalam isolasi tidaklah mungkin (Mustaniruddin, 2019:2). Ini selaras dengan wahyu Allah SWT dalam Surah *Al-Insyirah* ayat 6:

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ

Artinya:

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”. (Q.S. Al-Insyirah ayat 6)

Meskipun setiap manusia diciptakan dengan beragam karakter, sifat, dan kepribadian yang berbeda-beda, pada hakikatnya manusia memiliki fitrah sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup secara individual. Manusia memiliki keterbatasan dalam memenuhi seluruh kebutuhannya secara mandiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. Hal ini diperkuat oleh temuan para peneliti yang menyatakan bahwa kondisi terisolasi dalam kesendirian, seperti penjara isolasi, merupakan salah satu bentuk penderitaan psikologis yang paling berat bagi manusia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa individu sangat bergantung pada hubungan sosial, nilai-nilai kemanusiaan, serta keberadaannya dalam suatu kelompok masyarakat. (Kaelany, 2000:157-158) Selain membutuhkan interaksi dengan sesamanya, manusia juga memerlukan wadah, lembaga atau organisasi yang membantu, menjaga, dan membuat aturan-aturan agar mereka lebih mudah memenuhi kebutuhan hidupnya.

“Lembaga pemerintah, sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri bangsa telah menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai

tujuan utama negara, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam ketentuan mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, khususnya pada Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Namun demikian, dalam praktik kehidupan bermasyarakat, cita-cita kesejahteraan tersebut hingga saat ini belum sepenuhnya dapat diwujudkan secara optimal.” (Sodiq, 2015:382)

Dalam kerangka ekonomi Islam, kebahagiaan merupakan anugerah dari Allah yang diberikan kepada setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, yang berkehendak untuk melaksanakan amal kebaikan disertai dengan keyakinan teguh kepada-Nya. Adapun tiga indikator utama yang digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perspektif Islam meliputi tauhid, pola konsumsi, serta penghilangan segala bentuk rasa takut dan kegelisahan. Konsep ini sejalan dengan penjelasan tentang Kesejahteraan dalam Islam sebagaimana tercantum dalam Surah *Quraissy* ayat 3-4 (Hilmi, 2018:381)

Adanya perbedaan pandangan tentang bagaimana cara mengukur kesejahteraan, baik menurut pemikiran yang fokus pada materi, kebutuhan rohani, maupun cara kerja ekonomi pada umumnya, ternyata berbeda dengan konsep kesejahteraan dalam Islam. Perbedaan ini bisa kita pahami dari ayat Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai kesejahteraan, salah satunya terdapat dalam Surat *Al-Isra'* Ayat 26:

وَأَنْتَ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقُّهُ وَالْمُسْكِينُ وَابْنُ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya:

“Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (Q.S. Al-Isra' ayat 26)

Dalam buku Konsep Pemberdayaan Masyarakat (2024), pemberdayaan merupakan suatu proses yang bertujuan membentuk masyarakat yang mandiri dan sejahtera melalui penguatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kecakapan, serta kesadaran dalam memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki secara optimal. Upaya ini dilakukan melalui perumusan kebijakan, penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan, serta pemberian pendampingan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu bentuk dari pembangunan sektor perekonomian yang menggunakan nilai keunggulan dalam masyarakat untuk menciptakan pemikiran baru dalam program pembangunan yang berorientasi pada manusia, partisipasi aktif, memberdayakan, dan pembangunan yang berkesinambungan (Makandolu et al., 2023:3252). Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu pendekatan dalam pengembangan ekonomi yang mengintegrasikan nilai sosial yang ada di dalam komunitas. Konsep ini menawarkan perspektif baru dalam pembangunan, yang menekankan pentingnya aspek-aspek seperti berfokus pada masyarakat, partisipatif, memberdayakan, dan berkelanjutan (Chambers, 1995:10). Dalam hal ini, program-program pemerintah desa seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Pangan Non Tunai (BPMT), dan Program Keluarga Harapan (PKH) berfungsi sebagai instrumen untuk mendukung pemberdayaan masyarakat. Program keluarga harapan ini dapat dilakukan dengan prinsip pemberdayaan, prinsip pemberdayaan menurut Suharto (2005, 45-50) sebagai berikut:

1. Partisipasi

Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam semua tahap proses pemberdayaan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

2. Kemandirian/Keswadayaan

Tujuan pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri tanpa bergantung pada bantuan eksternal.

3. Kesenjangan

Pemberdayaan harus memastikan bahwa semua anggota masyarakat memperoleh kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi.

4. Keberlanjutan

Program pemberdayaan harus dirancang sedemikian rupa agar hasil yang dicapai dapat terus bertahan dan berkembang dalam jangka waktu yang panjang.

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah penduduk di Kampung Baru Padusunan mencapai 1378 jiwa, dari jumlah 407 kepala keluarga dengan sekitar 200 kepala keluarga (KK) yang tergolong dalam kategori pra-sejahtera. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengingat proporsi yang cukup signifikan masih berada dalam kondisi ekonomi yang kurang baik. Sementara itu, sebagian besar masyarakat lainnya telah mencapai status sejahtera.

Program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, seperti BLT, BPMT, dan PKH, merupakan langkah strategis untuk membantu masyarakat pra-sejahtera.

1. Bantuan Langsung Tunai (BLT): Program ini memberikan bantuan secara finansial kepada keluarga yang membutuhkan, sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. (Siti Zuhro, 2020:3)
2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT): Program ini bertujuan untuk memastikan akses masyarakat terhadap pangan yang cukup dan bergizi, yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. (Rachmat Hidayat, 2018:1)
3. Program Keluarga Harapan (PKH): PKH merupakan program yang memberikan bantuan bersyarat kepada keluarga pra sejahtera, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui ekonomi. (Sudarno Sumarto, 2016:6)

Di antara indikator keluarga pra sejahtera yang terjadi di Kampung Baru Padusunan yaitu

1. Keluarga dengan pendapatan per kapita dibawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS Kota Pariaman.
2. Ketidakstabilan pendapatan, seperti ketergantungan pada pekerjaan informal atau musiman seperti, petani, kuli, pedagang warung kecil, peternak.

3. Pendapatan masyarakat di kampung baru padusunan beragam dari sebagian masyarakat ada yang memiliki pendapatan sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000 per bulan, namun mayoritas masyarakat berada di kisaran pendapatan Rp. 1.000.000-Rp1.500.000 per bulan. Selain itu, tidak sedikit masyarakat yang memiliki pendapatan sekitar Rp500.000- Rp950.000 per bulan. Kelompok ini kategori pendapatan rendah, yang berpotensi menjadi keluarga pra sejahtera.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui lebih dalam mengenai pemberdayaan masyarakat desa Kampung Baru Padusunan melalui program pemerintah desa. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul “ **Pemberdayaan Masyarakat Kampung Baru Padusunan Melalui Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga**”.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini:

Bagaimana pemberdayaan masyarakat Kampung Baru Padusunan melalui Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga?

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, dibatasi pada:

- a. Bagaimana partisipasi masyarakat Kampung Baru Padusunan melalui Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga?
- b. Bagaimana kemandirian masyarakat kampung baru padusunan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui PKH?
- c. Bagaimana kesetaraan masyarakat kampung baru padusunan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga?
- d. Bagaimana keberlanjutan peran masyarakat Kampung Baru Padusunan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui PKH?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan partisipasi masyarakat Kampung Baru Padusunan tentang pentingnya partisipasi dalam Program Keluarga Harapan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kemandirian masyarakat Kampung Baru Padusunan dalam Program Keluarga Harapan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kesetaraan dari Program Keluarga Harapan bagi masyarakat/keluarga di Kampung Baru Padusunan.
4. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan keberlanjutan dari Program Keluarga Harapan bagi masyarakat/keluarga di Kampung Baru Padusunan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi tempat penelitian, dapat memberikan sebuah informasi yang akurat mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di Desa Kampung Baru Padusunan dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.
2. Bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan, penelitian ini juga dapat dijadikan bahan informasi dan penelitian lebih lanjut.

UIN IMAM BONJOL
PADANG